



EDISI SENIN 12 JANUARI 2026

H A R I A N

# LENTERA

Ins

02

GOVERNMENTTODAY  
Pakai KUHAP Baru, KPK Tak Tampilkan Tersangka OTT Pajak

04

NUSANTARA  
Catat! Bapanas Perpanjang Distribusi Beras SPHP hingga 31 Januari 2026

10

LISTSTYLE  
Ide Outfit Sesuai Prediksi Tren Warna 2026

## IRAN KACAU, AS DIKABARKAN RANCANG SERANGAN

Ratusan orang diyakini tewas dalam rangkaian demonstrasi yang telah menyebar ke lebih dari 100 kota di Iran. Aksi protes, yang memasuki hari ke-13, meletus karena masalah ekonomi dan telah berkembang menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memicu seruan mengakhiri Republik Islam, dan beberapa pihak mendesak pemulihan monarki. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan berbagai opsi serangan terhadap Iran, termasuk kemungkinan menggunakan Israel sebagai pihak yang melakukan serangan langsung. Berita lengkap baca hal.7 (foto:gettyimage)

# KONSTRUKSI KORUPSI HAJI: KPK UNGKIT JOKOWI

## Mantan Menag Yaqut dan Gus Alex Resmi Tersangka tapi Tak Ditahan

**P**enetapan status tersangka terhadap mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex belum diikuti dengan langkah penahanan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat keduanya dengan pasal tindak pidana korupsi terkait kuota haji periode 2023-2024. Tak hanya itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) juga diungkit komisi anti-rasuah. Pelaksana Tugas (Plt) Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan konstruksi perkara bermula pada 2023 ketika Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan bertemu dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul-Aziz Al Saud. Untuk memotong antrean haji reguler, saat itu pertemuan itu diberikan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu. Dalam pelaksanaannya, Yaqut membagi kuota tambahan tersebut dengan proporsi 50:50. Padahal semestinya mengikuti ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur proporsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. KPK memastikan alat bukti penetapan tersangka kepada Yaqut telah diperoleh meski kerugian negara di kasus itu masih dihitung. Di sisi lain, tanda tanya muncul karena pemilik travel haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur yang ikut dicekal dalam kasus tersebut tidak dijadikan tersangka. Padahal sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru berlaku mengatakan pencekalan hanya untuk tersangka. BACA HAL 11....

### JEJAK KORUPSI KUOTA HAJI 2023-2024

#### Kasus

- Dugaan korupsi pengelolaan kuota tambahan haji
- Terjadi di Kementerian Agama RI
- Periode: 2023-2024
- Ditangani KPK

#### Kuota Tambahan

- Kuota awal Indonesia: ±221.000 jemaah
- Tambahan dari Arab Saudi: 20.000 jemaah
- Seharusnya:
  - 92% Haji Reguler 18% Haji Khusus
- Fakta di lapangan:
  - 50% Reguler (10.000) 150% Khusus (10.000)

#### Dugaan Pelanggaran

- Pembagian kuota bertentangan UU No. 8 Tahun 2019
- Kuota haji khusus diduga diperjualbelikan
- Ada indikasi kickback / aliran dana balik
- Melibatkan oknum pejabat & pihak swasta

#### Dugaan Pelaku

- YCQ - Mantan Menteri Agama (tersangka)
- IAA (Gus Alex) - Mantan Staf Khusus Menag (tersangka)
- Fuad Hasan Masyhur - Bos Maktour Travel (dicekal)
- Pemeriksaan ±400 biro travel

#### Potensi Kerugian Negara

- Estimasi awal: ±Rp1 triliun
- Masih dalam proses audit BPK

### PROFIL YAQUT CHOLIL QOUMAS

#### Latar Belakang

- Aktif di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU)
- Putra ulama KH Cholil Bisri
- Adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf

#### Anggota DPR RI

- Periode: 2014-2019
- Politisi PDI Perjuangan

#### Rekam Jejak Organisasi

- Ketua Umum GP Ansor (2015-2019)
- Tokoh muda NU nasional

#### Karier Politik & Jabatan

- Menteri Agama RI
- Periode: 23 Desember 2020 - 2024



# PAKAI KUHAP BARU, KPK TAK TAMPILKAN TERSANGKA OTT PAJAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan kebijakan baru dalam penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) dengan tidak lagi menghadirkan atau memamerkan para tersangka saat konferensi pers. Kebijakan ini terlihat saat Komisi anti-rasuah mengumumkan dugaan suap pengurangan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026) dini hari.

**B**erbeda dari pola sebelumnya, konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hanya menampilkan barang bukti tanpa kehadiran fisik para tersangka.

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan langkah tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.

"Kok nggak ditampilkan para tersangkanya? Nah itu, kita mengadopsi KUHP yang baru. KUHP yang baru itu lebih fokus ke Hak Asasi Manusia (HAM). Jadi perlindungan HAM itu ada asas praduga tak bersalah dari yang



dilindungi dari para pihak. Itu kami sudah ikuti," ujar Asep.

Selain perubahan pola konferensi pers, KPK juga menerapkan kombinasi aturan hukum lama dan baru dalam

menjerat para tersangka. Hal ini dilakukan karena peristiwa pidana terjadi dalam masa transisi regulasi. Dugaan suap berlangsung sejak Desember 2025, sementara distribusi

## KPK MENETAPKAN LIMA ORANG SEBAGAI TERSANGKA, YAKNI:

- **Dwi Budi (DWB)**,  
Kepala KPP Madya Jakarta Utara
- **Agus Syaifudin (AGS)**,  
Kepala Seksi Waskon KPP  
Madya Jakarta Utara
- **Askob Bahtiar (ASB)**,  
tim penilai KPP Madya Jakarta Utara
- **Abdul Kadim Sahbudin (ABD)**,  
konsultan pajak
- **Edy Yulianto (EY)**,  
staf PT WP



uang suap dilakukan pada Januari 2026, setelah berlakunya KUHP baru.

"Kalau konstruksinya sama saja, ada pemberi dan penerima. Tapi penggunaan pasalnya menggunakan dua, yang lama dan yang baru. Nanti setelah tanggal 2 Januari ke depan, setelah perkara terjadi sepenuhnya di bawah UU baru, maka akan kita gunakan full UU yang baru," kata Asep.

## DJP Berhentikan Sementara Pegawai Pajak

**MENINDAKLANJUTI** penetapan tersangka oleh KPK, DJP memberhentikan sementara tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara yang terjerat perkara tersebut. Kebijakan ini diambil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, Minggu (11/1/2026).

Rosmauli menegaskan DJP terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas perkara tersebut dan akan menjatuhkan sanksi maksimal apabila para pegawai terbukti bersalah.

"DJP memandang peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dan tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun," tegasnya.

DJP juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat serta memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan normal.

"DJP mengajak seluruh pegawai DJP di manapun berada untuk menjadikan peristiwa ini sebagai

momentum memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, serta menjaga marwah institusi," ujar Rosmauli.

### Dukung Cabut Izin Konsultan Pajak

Selain sanksi terhadap pegawai internal, DJP juga mendukung langkah pencabutan izin praktik terhadap konsultan pajak yang terlibat dalam kasus tersebut. Konsultan pajak tersebut diduga berperan sebagai perantara dalam penyaluran uang suap.

"Terhadap pihak eksternal yang berstatus sebagai konsultan pajak, DJP mendukung penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif berupa pencabutan izin praktik konsultan pajak oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dengan koordinasi bersama DJP dan asosiasi profesi," kata Rosmauli.

### Singgung Buku Prabowo

Di sisi lain, KPK menilai kasus dugaan suap pengurusan pajak PT Wanatiara Persada (WP) menjadi gambaran nyata praktik kebocoran penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan. Fenomena tersebut,

menurut KPK, sejalan dengan apa yang pernah disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut kebocoran terjadi bahkan sebelum penerimaan negara masuk ke kas negara. Sektor pajak menjadi salah satu titik rawan yang kerap dimanfaatkan melalui praktik korupsi.

"Mungkin kalau rekan-rekan sekalian membaca, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah menyatakan di dalam bukunya bahwa ada kebocoran pada penerimaan atau pendapatan. Pendapatan ini salah satu yang bocor adalah di pajak. Jadi, sebelum masuk ke kas negara, kemudian bocor di sini," ujar Asep saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Menurut Asep, dugaan suap dalam proses pemeriksaan pajak PT Wanatiara Persada yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada periode 2021-2026, telah menimbulkan dampak luas bagi kepentingan negara. (wid,ist,kum/dya)

### Kode 'All In'

Kasus ini bermula pada September 2025 ketika PT Wanatiara Persada (WP), perusahaan tambang dan pemurnian bijih nikel, melaporkan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun pajak 2023. Hasil pemeriksaan awal oleh KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran pajak sekitar Rp75 miliar.

Atas temuan tersebut, PT WP mengajukan sanggahan beberapa kali. Dalam proses itu, perusahaan diduga berkoordinasi dengan Agus Syaifudin (AGS), Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara. AGS disebut meminta pembayaran pajak secara "all in" sebesar Rp23 miliar.

"Dari angka tersebut, sebesar Rp8 miliar diduga sebagai fee untuk AGS dan dibagikan kepada sejumlah pihak di lingkungan Ditjen Pajak," ungkap Asep.

Namun, PT WP hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp4 miliar. Kesepakatan tersebut berujung pada diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada Desember 2025 dengan nilai pajak hanya Rp15,7 miliar. Nilai ini turun sekitar Rp59,3 miliar atau sekitar 80 persen dari temuan awal, sehingga menimbulkan potensi kerugian pendapatan negara dalam jumlah besar. (wid,ist,kum/dya)



# PDIP TEGAS TOLAK PILKADA LEWAT DPRD, SINDIR DEMOKRASI 'POCO-POCO'

PDIP Perjuangan kembali menegaskan sikap penolakannya terhadap wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai ber lambang banteng tersebut menilai alasan efisiensi dan penekanan politik uang tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mereduksi hak konstitusional rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.

**P**enegasan itu disampaikan sejumlah kader muda PDIP dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026). Politikus muda PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, menilai praktik politik uang merupakan persoalan serius demokrasi yang seharusnya diselesaikan melalui penguatan sistem dan penegakan hukum, bukan dengan memangkas kedaulatan rakyat.

"PDIP Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus diselesaikan dengan mengamputi hak rakyat untuk memilih," tegas Mujab dalam konferensi pers hari kedua Rakernas.

Menurut Mujab, sikap tegas PDIP terhadap wacana Pilkada lewat DPRD sejatinya telah tersirat dalam pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Rakernas. Megawati, kata dia, menyampaikan kritik simbolik dengan mengibaratkan perjalanan demokrasi Indonesia seperti senam Poco-Poco yang bergerak maju, mundur, ke kanan, dan ke kiri.

"Bu Mega memberi sinyal dengan mengatakan, 'Kok demokrasi kita kayak senam Poco-Poco?'. Gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDIP Perjuangan, demokrasi itu harus bergerak maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur," ujar Mujab.

Ia menilai, pembahasan ulang sistem Pilkada menjadi momentum krusial bagi bangsa Indonesia untuk menentukan arah demokrasi ke depan. Apakah demokrasi akan terus berkembang dan memperkuat kedaulatan rakyat, atau justru mengalami kemunduran dengan kembali ke mekanisme yang membatasi partisipasi publik.

Pandangan serupa disampaikan politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro. Ia menekankan bahwa pemilihan langsung merupakan sarana penting untuk membangun kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Tanpa mekanisme tersebut, ikatan antara penguasa dan warga dinilai akan semakin renggang.

"Bagaimana seorang pemimpin



Kader muda PDIP Perjuangan menyampaikan pandangan atas pidato Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menekankan isu perubahan iklim dan perlindungan lingkungan dalam Rapat Kerja Nasional I PDIP Perjuangan 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, pada Minggu (11/1/2026). Dok. PDIP

bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika ia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit berharap persoalan

rakyat dapat diselesaikan secara menyeluruh," kata Seno.

Seno menambahkan, bagi PDIP, demokrasi bukan semata-mata soal memenangkan kontestasi politik atau

## Menko Kumham Imipas: Sama-sama Konstitusional

**MENTERI** Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pilkada secara langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

Yusril mengatakan ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa secara eksplisit menyatakan mekanisme pemilihannya.

"Kepala daerah dipilih langsung atau melalui DPRD, dua-duanya adalah konstitusional. Norma Pasal 18 UUD 1945 hanya mensyaratkan bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis," kata Yusril dalam keterangan diterima.

Secara pribadi, Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan

UUD 1945, yakni asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

"Asas ini mengajarkan bahwa demokrasi tidak dijalankan oleh setiap orang berdasarkan pemikirannya sendiri-sendiri, melainkan melalui hikmat kebijaksanaan dan dilaksanakan dalam lembaga permusyawaratan; MPR dan perwakilan; DPR dan DPRD," katanya.

Secara filosofis, dia menjelaskan rakyat dalam jumlah besar tidak mungkin melakukan musyawarah secara langsung. Oleh karena itu, mekanisme permusyawaratan hanya dapat dijalankan melalui lembaga perwakilan, seperti MPR, DPR, dan DPRD.

"Musyawarah hanya mungkin dilakukan melalui badan atau lembaga permusyawaratan dan perwakilan. Inilah filosofi bernegara yang dirumuskan oleh para founding fathers. Namun, dalam era reformasi sering kali kita lupakan," tuturnya.

Dari sisi implementasi, Menko

sekadar menghitung kursi kekuasaan. Lebih dari itu, demokrasi adalah tentang bagaimana seorang pemimpin menjalankan amanah dan mengelola pemerintahan secara bertanggung jawab.

"Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Jangan sampai hak mereka untuk menentukan pemimpin selama lima tahun ke depan justru berkurang. Bagi kami, itu sulit diterima oleh akal sehat," tegasnya.

Sikap penolakan PDIP terhadap Pilkada melalui DPRD juga ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. Ia menyatakan bahwa partainya secara konsisten mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, mengingat mekanisme tersebut merupakan hasil perjalanan panjang demokrasi Indonesia pascareformasi. (tin,ist,kum/dya)

### SIKAP PARTAI POLITIK:

#### SETUJU

**Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan Demokrat.**

#### TIDAK SETUJU

**PDIP Perjuangan**

#### MASIH MENGAJAI

**PKS dan PAN**



Yusril menilai pilkada secara langsung justru menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat. Salah satu persoalan utama yang ia soroti adalah tingginya biaya politik dalam pilkada langsung.

"Pilkada langsung jelas berbiaya tinggi. Biaya tinggi ini mendorong kepala daerah terpilih untuk menyalahgunakan kekuasaan demi menutupi ongkos politik yang telah dikeluarkan," ujarnya.

Dia menilai pengawasan terhadap praktik politik uang jauh lebih sulit dalam pilkada langsung karena melibatkan puluhan ribu hingga jutaan pemilih. "Lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya terbatas, dibandingkan mengawasi jutaan pemilih dalam pilkada langsung," imbuhnya. (wid,ist,kum/dya)

# CATAT! BAPANAS PERPANJANG DISTRIBUSI BERAS SPHP HINGGA 31 JANUARI 2026

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stabilisasi pasokan dan harga beras tetap terjaga di awal 2026 dengan memperpanjang distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 31 Januari 2026. Kebijakan ini dilakukan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

**S**ekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan perpanjangan distribusi SPHP beras dimungkinkan karena adanya skema RPATA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025.

“Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional,” kata Sarwo Edhy di Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Sarwo menjelaskan, RPATA merupakan rekening milik bendahara umum negara yang digunakan untuk menampung dana penyelesaian pekerjaan yang belum tuntas hingga akhir tahun anggaran, dengan memberikan kesempatan penyelesaian melewati batas tahun anggaran.

Melalui skema ini, program SPHP beras 2025 tetap dapat berjalan optimal hingga akhir Januari 2026.

Menurutnya, kebijakan perpanjangan ini bersifat antisipatif untuk menghadapi dinamika harga pasca pergantian tahun, sekaligus menjamin masyarakat tetap memperoleh akses beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Dengan perpanjangan tersebut, Bapanas telah menginformasikan kepada Perum Bulog dan seluruh



(Ilustrasi) Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperpanjang hingga 31 Januari 2026.dok.ant

pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga Satgas Pangan Polri, bahwa penyaluran SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan hingga 31 Januari 2026.

“Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin,” ujar Sarwo.

Ia menegaskan, sesuai arahan Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, harga beras harus terus dijaga agar tetap terjangkau oleh masyarakat. “Dengan adanya beras SPHP ini masyarakat dapat memperoleh akses beras yang berkualitas terjaga dengan harga yang baik pula,” tambahnya.

Hingga akhir 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan perpanjangan tersebut diperkuat oleh ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang mencapai 3,25 juta ton hingga akhir 2025.

“Kondisi itu memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur,” jelas Sarwo.

Penyaluran SPHP beras 2025 tetap dilakukan melalui berbagai kanal distribusi, antara lain Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah, guna menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.

Sementara itu, untuk program SPHP beras tahun 2026, Bapanas masih memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Target penyaluran SPHP beras 2026 telah disepakati secara mufakat dalam Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025 sebesar 1,5 juta ton, dengan rencana pelaksanaan dimulai pada 1 Februari 2026.

Sarwo juga menyebutkan, skema RPATA sebelumnya telah diterapkan dalam perpanjangan pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua tahun 2025 berupa beras dan minyak goreng. Hingga 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan tersebut kepada 17,582 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng secara nasional.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi sangat aman sehingga tidak ada alasan bagi pelaku usaha perberasan untuk menjual beras di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.(wid,ist/dya)

## CAPAIAN PANGAN 2025

### PRODUKSI BERAS NASIONAL:

Produksi beras pada tahun 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, yang mana jumlah ini melampaui kebutuhan domestik.

### STOK BERAS:

Pada awal Desember 2025, stok beras mencapai 3,8 juta ton. Angka ini tercatat sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah.

### KEMANDIRIAN IMPOR:

Sebesar 100% beras yang tersimpan di gudang Bulog berasal dari petani Indonesia, menunjukkan tidak adanya ketergantungan pada impor.

### HARGA PATOKAN:

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah mengalami kenaikan menjadi Rp6.500/kg.

### SWASEMBADA JAGUNG:

Indonesia berhasil mencapai swasembada jagung dengan jumlah panen hingga 2,8 juta



## Bulog Siapkan 1 Juta Ton Beras Premium untuk Ekspor

**P**EMERINTAH menargetkan Indonesia mulai merealisasikan ekspor beras pada 2026. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Perum Bulog menyiapkan alokasi beras premium sebanyak 1 juta ton yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan alokasi beras untuk ekspor tersebut diambil dari total stok Bulog yang saat ini mencapai sekitar 3,25 juta ton. Ia menegaskan, langkah tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan beras di dalam negeri, termasuk pada periode kebutuhan tinggi seperti Imlek, Ramadan, dan Idulfitri.

“Kalau kita stok-kan 1 juta ton, masih sisa 2,5 juta ton. Jadi stok untuk Imlek, kemudian masuk Ramadan,

baru Lebaran, kami yakinkan aman. Dengan stok yang terpotong 1 juta ton untuk ekspor itu, masih sisa 2,25 juta ton. Aman,” ujar Rizal saat ditemui di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bulog 2025 di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026).

Rizal menjelaskan, beras yang disiapkan untuk ekspor merupakan beras dengan kualitas premium. Namun, hingga kini Bulog masih melakukan penjajakan dan komunikasi intensif terkait negara tujuan ekspor, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

“Setiap kami rapat dengan atase perdagangan dari seluruh atase perdagangan yang ada di ASEAN dulu. Alhamdulillah sudah ada komunikasi. Namun kami sudah mengantisipasi, Bulog sudah menyiapkan 1 juta sesuai

dengan arahan Mentan,” kata Rizal.

Ia menambahkan, Bulog saat ini masih menunggu respons lanjutan dari masing-masing negara mitra. Meski demikian, pihaknya optimistis akan ada kejelasan dalam beberapa pekan hingga beberapa bulan ke depan.

“1 juta untuk ekspor, nanti itu yang akan dijual dengan kualitas premium,” ujar Rizal dalam kesempatan terpisah usai Rakernas Bulog.

Rizal kembali menegaskan, rencana ekspor tersebut hanya akan direalisasikan setelah kebutuhan dalam negeri benar-benar terpenuhi. Menurutnya, kondisi stok beras nasional saat ini sangat mencukupi untuk mendukung ekspor sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar domestik.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan optimisme bahwa Indonesia dapat melakukan ekspor beras pada 2026. Ia menilai ekspor bisa direalisasikan apabila serapan beras oleh Bulog setidaknya menyamai capaian tahun 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).(wid,rla/dya)



## MBG Makan Korban Lagi

# RATUSAN SISWA KERACUNAN DI MOJOKERTO DAN GROBOGAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan setelah ratusan pelajar di dua daerah berbeda dilaporkan mengalami dugaan keracunan massal. Kali ini, kasus terjadi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan jumlah korban mencapai ratusan siswa dan santri dari berbagai jenjang pendidikan.

**D**i Kabupaten Mojokerto, Dinas Kesehatan setempat mencatat sedikitnya 261 murid dari jenjang PAUD hingga SMA mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi menu MBG. Jumlah tersebut merupakan data korban yang tercatat dan tertangani melalui posko kesehatan hingga Minggu (11/1/2026).

"Data terakhir yang masuk kepada kami di posko itu sampai hari ini 261," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dyan Anggrahini.

Namun demikian, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Dyan menyebut masih dimungkinkan adanya korban lain yang memilih berobat secara mandiri tanpa melapor ke posko kesehatan yang disediakan pemerintah daerah.

"Yang kami sampaikan ini adalah data yang masuk dan tertangani oleh kami. Bisa jadi jumlahnya lebih, karena ada korban yang langsung ke rumah sakit atau berobat mandiri ke dokter di luar fasilitas yang kami tunjuk," ujarnya.

Dari ratusan korban tersebut, Dinkes Mojokerto belum merinci secara pasti asal sekolah masing-masing siswa. Namun, para korban diduga berasal dari tujuh lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Yang paling banyak berasal dari Pondok Pesantren Mahad Annur," ungkap Dyan.

Seluruh korban dilaporkan mengalami keluhan yang relatif seragam, mulai dari mual, muntah, diare, demam, hingga pusing, yang mengarah pada indikasi keracunan makanan.

Dari sekitar 200 korban yang sempat tercatat, 121 orang masih menjalani perawatan, dengan rincian 112 dirawat di rumah sakit dan puskesmas, serta 9 orang ditangani di posko kesehatan.

Menu MBG yang terakhir dikonsumsi para korban diketahui berupa soto, telur, dan ayam berbumbu kuning. Hingga kini, Dinkes Mojokerto masih melakukan penelusuran untuk memastikan sumber pasti dugaan keracunan tersebut.

"Masih kami cari penyebabnya. Bisa dari makanan tertentu, bisa juga dari proses penyajian, pengiriman, atau waktu konsumsi yang terlalu



lama sehingga memungkinkan munculnya bakteri. Yang jelas, saat ini indikasinya mengarah pada keracunan," pungkas Dyan.

### Ada Lauk Berbau

Ratusan santri dan guru Pondok Pesantren (Ponpes) Assalafi Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan

Gubug, Kabupaten Grobogan turut menjadi korban keracunan massal yang diduga dipicu menu makan bergizi gratis (MBG). Pihak ponpes menyebut para santri mulai mengalami gejala pada Jumat (9/1/2026) malam dan puncaknya pada Sabtu (10/1/2026) pagi.

Tim Media Ponpes Assalafi

Miftahul Huda, Dzul Fikar mengatakan jumlah santri penerima manfaat MBG di pondoknya total sebanyak 1.172 orang.

"Penerima manfaat MBG di pondok, 537 (orang) tingkat SMK, 635 orang tingkat SMP. Iya (dari satu SPPG yang sama)," kata Dzul, Minggu (11/1/2026).

Dzul menceritakan detik-detik para santri merasakan masalah kesehatan secara massal. Menurutnya, mereka mulai merasakan gejala ringan pada Jumat (9/1/2026) malam.

"Jadi MBG itu (diterima) Jumat pagi. Sejak Jumat malam, itu sudah mulai ada gejala, tapi gejalanya gejala ringan," beber Dzul.

Kondisi kesehatan para santri itu makin memburuk pada Sabtu (10/1). Dzul menyebut pihaknya kemudian segera mengadakan peristiwa ini ke Dinas Kesehatan. (tin,dtj,ist/dya)

## Viral Makanan Dibungkus Plastik, Ini Penjelasan SPPG dan BGN



Tangkapan layar video yang beredar di media sosial memperlihatkan makanan MBG untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (kelompok 3B) disajikan menggunakan kantong plastik di Kabupaten Pandeglang, Banten.ist

**SEMENTARA** di Kabupaten Pandeglang, Banten, viral video distribusi MBG yang dinilai tidak sesuai standar operasional.

Di Pandeglang, video yang beredar di media sosial memperlihatkan makanan MBG untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (kelompok 3B) disajikan menggunakan kantong plastik. Video tersebut menuai kritik publik karena dinilai tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN) yang mewajibkan penggunaan ompreng atau foodtray.

Menanggapi hal tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karyasari, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, memberikan klarifikasi resmi. Kepala SPPG Karyasari, Dimas Dhika Alpiyan,

menjelaskan bahwa distribusi makanan pada Kamis (8/1/2026) sejatinya telah dilakukan sesuai SOP.

"Dari SPPG sudah sesuai SOP dengan pengiriman menggunakan foodtray," kata Juru Bicara BGN, Redy Hendra, saat dikonfirmasi, Minggu (11/1/2026).

Dimas menjelaskan, menu MBG hari itu disiapkan untuk kelompok penerima manfaat 3B dan dikirim menggunakan ompreng. Namun, sebanya di lokasi penerima, makanan tersebut dipindahkan oleh salah seorang kader posyandu ke dalam kantong plastik tanpa sepengetahuan pihak SPPG.

"Namun setelah ompreng tiba di tempat oleh ibu kader yang bersangkutan makanan yang di dalam ompreng dipindahkan dan disatukan penyajiannya di dalam kantong plastik karena ibu kader memiliki alasan spontanitas," ujar Dimas.

"Setelah itu, oleh ibu kader diberikan kepada penerima manfaat yaitu bumil, busui, dan balita. Ompreng kembali dibawa pulang oleh sopir dengan keadaan kosong,"

tambahnya.

Peristiwa tersebut baru diketahui pihak SPPG keesokan harinya setelah potongan video viral di media sosial. Pihak SPPG kemudian memanggil para kader posyandu untuk klarifikasi.

"Setelah video tersebut viral kami pihak SPPG Karyasari Sukaresmi mengundang para ibu kader untuk komunikasi lebih dalam. Ibu kader datang pada Jumat, 9 Januari, pukul 09.00. Ibu kader mengklarifikasi bahwasanya mereka memang memasukkan menu tersebut ke dalam plastik karena keadaan spontanitas yang terjadi," jelas Dimas.

Penjelasan serupa disampaikan Koordinator Kader Posyandu Desa Pasirkadu, Lusi, yang menegaskan bahwa pemindahan makanan ke kantong plastik dilakukan bukan karena makanan tidak layak, melainkan untuk menghindari risiko kontaminasi cuaca.

"Perlu kami luruskan, bukan seperti yang terlihat di video itu. Kejadiannya sangat spontan, ditambah cuaca saat itu tidak memungkinkan. Akhirnya makanan kami pindahkan dari ompreng ke plastik semata-mata karena khawatir terkena air hujan," ucap Lusi. (wid,ist,kum/dya)

## Kasus HIV Mayoritas dari Luar Kota Malang, DPRD Minta Pengawasan Kos Diperketat



Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi. (Santi/Lentera)

**MALANG** - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang mencatat mayoritas temuan orang dengan HIV (ODHIV) sepanjang 2025 berasal dari luar daerah. Kondisi ini mendapat perhatian DPRD Kota Malang yang meminta agar pengawasan rumah kos diperketat melalui penegakan regulasi.

"Informasi yang saya dapatkan

dari lingkungan, terutama lingkungan kos-kosan, memang cukup memprihatinkan. Banyak kos-kosan yang tidak menjalankan Perda terkait kos. Artinya, tidak ada orang yang bertanggung jawab di tempat kos tersebut," ujar Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, dikutip pada Minggu (11/1/2026).

Arief menilai, kondisi rumah kos yang tidak memiliki penanggung jawab turut membuat aktivitas penghuni sulit terpantau. Hal tersebut dinilai membuka ruang terjadinya perilaku berisiko tanpa adanya kontrol dari pengelola maupun lingkungan sekitar.

"Inilah yang menurut saya sebagai salah satu pemicu munculnya penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS. Angka

yang terdeteksi saja sudah tinggi, saya yakin yang belum terdeteksi jauh lebih banyak lagi," katanya.

Sebagai informasi, Dinkes Kota Malang mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat 350 kasus HIV yang ditemukan di wilayah Kota Malang. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen pengidap merupakan pendatang dari luar daerah, sementara 30 persen lainnya adalah warga asli Kota Malang.

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan ratusan kasus tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan tes HIV terhadap sekitar 17 ribu orang selama tahun 2025.

Husnul menyebutkan, latar belakang ODHIV di Kota Malang cukup beragam, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat umum. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah laki-laki seks dengan laki-laki (LSL) yang didominasi mahasiswa dari luar daerah yang sedang menempuh pendidikan di Kota Malang.

Menanggapi kondisi tersebut, Arief menegaskan Kota Malang

sejatinya telah memiliki regulasi yang cukup jelas terkait pengelolaan rumah kos, yakni Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. Namun, implementasinya dinilai masih belum berjalan optimal.

Dalam Perda itu, Arief menjelaskan terdapat dua ketentuan utama yang wajib dipatuhi pemilik rumah kos. Pertama, setiap rumah kos harus memiliki penanggung jawab yang tinggal di area kos. Kedua, dilarang adanya kos campur antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan.

"Kalau ada ibu kos atau bapak kos yang tinggal di sana, mereka pasti tahu jika ada keanehan di antara penghuni. Kalau tidak ada yang jaga, ya kos-kosan itu jadi bebas," ujarnya.

Selain itu, Arief juga mendorong adanya operasi dan pendataan rutin terhadap seluruh rumah kos di Kota Malang. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat kewilayahan, hingga masyarakat. (Santi/Dya)

## Buntut Banjir Berulang, Pemkot Batu Cek Pengelolaan Lahan di Hulu Kali Paron

**BATU** - Banjir yang berulang kali terjadi di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu kini menjadi perhatian pemerintah setempat. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) tengah melakukan pengecekan terhadap aktivitas pengelolaan lahan di kawasan hulu Kali Paron.

Pasalnya, hasil penelusuran sementara menemukan adanya sumbatan material di aliran sungai atau Kali Paron yang diduga menjadi pemicu utama luapan air ke kawasan permukiman warga.

"Sesuai instruksi Pak Wali Kota, kami mulai melakukan pemetaan untuk pengecekan. Ini penting untuk mengetahui apakah ada pengolahan lahan di hulu yang kurang memperhatikan lingkungan," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Batu, Alfi Nurhidayat, dikutip pada Minggu (11/1/2026).

Menurutnya, langkah tersebut diambil setelah ditemukannya sumbatan material dalam jumlah cukup besar saat banjir meluap dari Kali Paron beberapa waktu lalu. Material tersebut dinilai menghambat aliran air sungai sehingga

memperparah genangan di wilayah hilir.

Alfi menjelaskan, sumbatan tersebut diduga berasal dari sisa-sisa aktivitas pertanian maupun material alami yang terbawa arus saat hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi permasalahan pada pengelolaan lahan di kawasan hulu.

Untuk memastikan hal tersebut, Dinas PUPR Kota Batu menggunakan pemetaan udara guna mengidentifikasi pola pemanfaatan lahan, termasuk aktivitas pertanian dan indikasi alih fungsi lahan yang berpotensi meningkatkan limpasan air permukaan.

"Sampah pertanian atau sisa tanaman yang terbawa ke sungai saat hujan deras bisa menjadi salah satu faktor penyebab sumbatan aliran sungai," jelasnya.

Alfi menegaskan, pengolahan lahan yang tidak menerapkan prinsip konservasi lingkungan berisiko menyebabkan tanah, material organik, dan sisa tanaman terbawa aliran air hujan dan masuk ke badan sungai. Kondisi ini, jika terjadi terus-menerus, dapat memperbesar potensi banjir.

Dikatakannya, hasil pemetaan dan

kajian yang tengah dilakukan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Wali Kota Batu, Nurochman. Laporan itu akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan terkait penanganan banjir di Kali Paron.

Lebih lanjut, Alfi menekankan upaya penanggulangan banjir tidak bisa hanya bertumpu pada normalisasi sungai atau pembangunan infrastruktur di wilayah hilir. Penataan kawasan hulu sungai justru memegang peran penting dalam pengendalian banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan.

"Dari hasil kajian ini nanti akan bermuara pada kesimpulan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan di hilir. Hulu sungai juga harus tertata dengan baik," tegasnya.

Ia juga mengingatkan, menjaga kelestarian lingkungan dan daerah aliran sungai merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Kesadaran kolektif dalam mengelola lahan secara



Ilustrasi: Kondisi Kali Paron, Dusun Beru, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. (dok.ist/instagram dpuprkwb)

berkelanjutan dinilai menjadi kunci utama untuk mencegah banjir berulang di Kota Batu.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 209 peristiwa bencana alam. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 122 kejadian. (Santi/Dya)



# KRISIS IRAN MELUAS

## INTERNET DIPUTUS, 116 ORANG TEWAS

Gelombang protes nasional di Iran terus membesar dan berubah menjadi krisis multidimensi yang mengancam stabilitas pemerintahan. Aksi demonstrasi anti-rezim yang berlangsung sejak akhir Desember kini menjalar ke berbagai kota besar, di tengah pemutusan total akses internet dan komunikasi seluler oleh otoritas negara. Lembaga pemantau hak asasi manusia Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat mencatat sedikitnya 116 orang tewas akibat kekerasan dalam rangkaian unjuk rasa.

**G**elombang demonstrasi di Iran terus terjadi akibat lonjakan biaya hidup, tingginya laju inflasi, hingga sulitnya mencari pekerjaan. Mengutip Bloomberg, Minggu (11/1/2026), gelombang demo pecah di Teheran dimulai pada akhir bulan lalu, setelah nilai tukar rial anjlok ke level terendah sepanjang sejarah.

Dari 116 korban tewas, puluhan di antaranya disebut berasal dari kalangan aparat keamanan. Selain korban jiwa, lebih dari 2.600 orang dilaporkan ditangkap, meski angka ini diyakini masih akan bertambah seiring terbatasnya arus informasi akibat pemadaman internet nasional.

Langkah pemutusan jaringan yang telah berlangsung lebih dari 60 jam dinilai memperburuk situasi.



Para demonstran memblokir jalan dalam demonstrasi di Teheran, Iran, pada 9 Januari 2026. (dok.getty)

Pemantau internet global NetBlocks menyebut kebijakan sensor tersebut sebagai ancaman serius terhadap keselamatan warga sipil. "Langkah ini menghadirkan risiko langsung bagi

kesejahteraan masyarakat Iran di momen krusial bagi masa depan negara," tulis NetBlocks dalam pernyataannya.

Meski komunikasi digital

### GAMBARAN KRISIS EKONOMI DAN DEMO DI IRAN

#### PENYEBAB UTAMA:

Protes bermula di Teheran pada akhir Desember 2025 akibat lonjakan harga barang dan jatuhnya nilai mata uang nasional ke rekor terendah. Ketidakpuasan ini kemudian meluas menjadi gerakan anti-pemerintah yang menuntut penggulingan rezim.

#### SKALA DAN KORBAN:

Aksi protes telah menyebar ke lebih dari 170 lokasi di sedikitnya 25 hingga 31 provinsi. Hingga 11 Januari 2026, laporan menyebutkan jumlah korban tewas mencapai angka yang bervariasi, dari sedikitnya 36 orang hingga klaim mencapai 217 orang akibat penggunaan peluru tajam oleh aparat keamanan.

#### RESPONS PEMERINTAH:

Otoritas Iran memberlakukan pemadaman internet nasional dan pembatasan telepon internasional untuk menghambat pengorganisasian massa. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menuduh pihak asing, termasuk Amerika Serikat dan Israel, sebagai dalang di balik kerusuhan tersebut.

#### ESKALASI KETEGANGAN INTERNASIONAL:

Presiden AS Donald Trump memberikan peringatan keras akan melakukan intervensi jika pemerintah Iran terus menggunakan kekerasan terhadap demonstran. Di sisi lain, muncul laporan intelijen yang menyebut adanya rencana darurat Khamenei untuk mencari perlindungan ke Rusia jika situasi tidak terkendali.



## Trump Pertimbangkan Gunakan Israel, Teheran Ancam Balasan Terbuka

**KETEGANGAN** geopolitik di Timur Tengah kian memanas seiring memburuknya krisis internal Iran dan meningkatnya ancaman militer dari luar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan berbagai opsi serangan terhadap Iran, termasuk kemungkinan menggunakan Israel sebagai pihak yang melakukan serangan langsung, langkah yang dinilai dapat meminimalkan tekanan politik internasional terhadap Washington.

Kekhawatiran global mencuat setelah laporan The New York Times mengungkap bahwa Trump telah menerima paparan sejumlah skenario militer dari para pejabat senior AS. Opsi tersebut mencakup serangan terbatas terhadap target di Teheran, termasuk sasaran non-militer serta aparat keamanan Iran yang terlibat dalam penindakan aksi protes nasional. Meski demikian, hingga kini Trump belum mengambil keputusan final.

Menurut laporan RIA Novosti dari Moskow, opsi menyerahkan eksekusi serangan kepada Israel

dianggap lebih "praktis" secara politik. Israel dinilai telah terbiasa menghadapi ancaman internasional akibat operasi militernya di kawasan, sementara langkah tersebut memungkinkan Trump menghindari tuduhan agresi langsung terhadap Iran.

Namun, para pejabat pertahanan AS menyadari risiko besar dari skenario tersebut. Seorang petinggi militer AS mengatakan kepada NYT bahwa jika serangan disetujui, para komandan di Timur Tengah memerlukan waktu untuk menyiapkan pertahanan guna mengantisipasi serangan balasan terhadap pasukan dan diplomat AS di kawasan.

Gedung Putih, menanggapi laporan tersebut, merujuk pada pernyataan Trump sebelumnya yang memperingatkan Iran akan adanya "konsekuensi serius" jika demonstran sipil terus menjadi korban. Pada Sabtu, Trump kembali menegaskan bahwa Amerika Serikat "siap membantu" rakyat Iran yang tengah menghadapi penindakan aparat.

Di saat bersamaan, eskalasi internal Iran terus memburuk. Gelombang unjuk rasa nasional yang

telah berlangsung lebih dari dua pekan menantang sistem teokrasi yang berkuasa sejak Revolusi Islam 1979. Demonstrasi besar kembali pecah di Teheran dan kota-kota utama lain, meski pemerintah memberlakukan pemadaman internet nasional yang menyulitkan pemantauan dari luar negeri.

Menanggapi ancaman dari Washington, Iran melontarkan peringatan keras. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Israel akan menjadi target sah jika Washington berani melancarkan serangan terhadap Republik Islam tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang parlemen yang diwarnai teriakan "matilah Amerika" dari para anggota.

"Kami tidak akan menunggu sampai diserang. Setiap tanda objektif adanya ancaman akan kami respons," ujar Qalibaf. Ia secara terbuka mengancam Israel, yang ia sebut sebagai "wilayah pendudukan", serta seluruh pangkalan, pusat, dan kapal militer AS di kawasan. (wid,rtr,ist/dya)

diblokir, video-video yang bocor dari dalam negeri menunjukkan ribuan warga tetap turun ke jalan di Teheran, Mashhad, Karaj, Shiraz, hingga Tabriz.

Dalam sejumlah rekaman, tampak kendaraan dibakar, kembang api dinyalakan, serta massa meneriakkan slogan-slogan keras seperti "Mati untuk diktator" dan "Mati untuk Khamenei".

Simbol-simbol monarki pra-Revolusi Islam 1979 juga kembali bermunculan. Para demonstran mengibarkan bendera lama Iran dengan lambang Singa dan Matahari, simbol yang erat dengan era kekuasaan Dinasti Pahlavi. Aksi ini disebut mengikuti seruan Reza Pahlavi, putra Shah Iran yang hidup di pengasingan.

"Jangan tinggalkan jalanan. Hati saya bersama kalian. Saya tahu saya akan segera berada di sisi kalian," ujar Reza Pahlavi dalam pernyataannya yang dikutip AFP. Ia mendorong para pendukungnya untuk merebut dan mempertahankan ruang-ruang publik sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim teokrasi yang berkuasa sejak 1979. (gus,ist,blo/dya)

# CATAT! JENIS TEH DENGAN KANDUNGAN ANTIOKSIDAN TINGGI

Selain rasa yang enak, teh juga menawarkan kandungan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Namun, bukan hanya teh hijau saja, ada 4 jenis teh lainnya juga punya kandungan serupa.

**S**ecangkir teh di pagi atau sore hari bisa menjadi pilihan tepat untuk menenangkan pikiran. Rasa dan aroma khasnya mampu membangkitkan suasana hati sehingga kamu merasa lebih rileks. Namun, teh tidak hanya menawarkan kenikmatan rasa, kandungan antioksidannya juga menjadi nilai plus bagi kesehatan.

Dikutip dari Eatingwell, antioksidan adalah senyawa yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh sekaligus menurunkan risiko berbagai penyakit. Namun, banyak orang yang beranggapan teh hijau menjadi salah satu jenis yang punya kadar antioksidan yang tinggi. Padahal ada banyak jenis lainnya yang

juga punya kandungan serupa bahkan lebih baik. Lalu, teh jenis apa saja yang memiliki kandungan antioksidan tinggi? Ada empat teh yang bisa disediakan di rumah sebagai teman untuk menenangkan pikiran.

## White tea

Urutan pertama ada white tea atau teh putih. Jenis ini memiliki kadar antioksidan yang tinggi karena proses pembuatannya hanya dikeringkan tanpa dikukus atau dipanggang seperti the hijau.

Menurut jurnal bertajuk "Tea's anti-obesity properties, cardiometabolic health-promoting potentials, bioactive compounds, and adverse effects: A review focusing on white and green teas" (2023), antioksidan yang terkandung di dalamnya bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Di antaranya mengelola lemak dalam darah dan menurunkan kadar kolesterol jahat.

Cara terbaik konsumsi teh putih adalah menyeduh daun teh berkualitas dengan air bersuhu 70-80°C selama 2-5 menit, tanpa gula atau pemanis tambahan. Tidak dikonsumsi saat perut kosong, idealnya setelah sarapan/makan siang untuk memaksimalkan antioksidan dan rasa lembutnya. Serta memberi jeda 1-2 jam setelah makan besar agar tidak mengganggu penyerapan zat besi. Cukup 1-2 cangkir per hari untuk menghindari asupan kafein berlebihan.

## The rosella

Teh yang terbuat dari bunga rosella ini memiliki ciri khas yang asam. Dikutip dari Verywell Health, teh ini memiliki manfaat dalam menurunkan tekanan darah. Selain itu, kandungan antioksidannya membantu mengurangi peradangan. "Teh kembang

sepatu kaya akan flavonoid, termasuk antosianin dan quercetin. Teh kembang sepatu tampaknya menurunkan kolesterol LDL dan trigliserida," ujar Marie Spano, MS, RD, CSCS, CSSD, ahli gizi dan olahraga asal Amerika yang dikutip dari Eatingwell. Manfaat lain juga tercantum dalam jurnal berjudul "Dietary Plants for the Prevention and Management of Kidney Stones: Preclinical and Clinical Evidence and Molecular Mechanisms" (2018). Dalam temuan tersebut, teh ini dapat mengobati batu ginjal.

Cara terbaik mengonsumsi teh rosella adalah dengan menyeduh kelopak bunga rosella kering (3-5 kelopak) dengan air panas (250 ml) selama 5-10 menit hingga air berwarna merah. Kemudian nikmati hangat atau dingin, bisa ditambah madu/lemon, dan konsumsi 1-2 cangkir sehari, dengan jeda 10 hari minum, 7 hari istirahat. Lakukan konsultasi dengan dokter jika ada kondisi kesehatan seperti gangguan hati atau hipotensi.

## The rooibos

The ini memiliki rasa manis dengan sedikit aroma kacang. Dikutip dari Eatingwell, jenis teh ini tidak mengandung kafein, Ladies. Jadi, cocok bagi kamu yang

sensitif terhadap kafein. Rooibos memiliki kandungan antioksidan berupa aspalathin yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah.

Cara terbaik konsumsi teh rooibos adalah diseduh dengan air panas (90-95°C) selama 3-5 menit. Bisa dinikmati hangat atau dingin, dengan atau tanpa tambahan seperti susu (sapi, almond) atau pemanis alami seperti kayu manis.

## The oolong

Kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan namanya. Teh oolong ini berasal dari Tiongkok dengan perpaduan antara teh hijau dan hitam. Teh ini dipercaya memiliki kadar antioksidan yang tinggi berkat proses fermentasi dari hasil pembuatannya.

Antioksidan dalam teh oolong juga terbukti menjanjikan sebagai penunjang penurunan berat badan dan pengelolaan gula darah," ungkap Barbara Ruhs, MS, RD, ahli diet asal Amerika Serikat. Selain itu teh ini juga memiliki kandungan asam amino yang dapat membantu tubuh lebih rileks.

Cara terbaik konsumsi teh oolong adalah menyeduh dengan air panas 90-95°C selama 3-5 menit. Nikmati hangat atau dingin tanpa gula, dan minum setelah makan atau di sela aktivitas untuk membantu pencernaan dan mengontrol nafsu makan. Hindari saat perut kosong dan sebelum tidur karena kafeinnya. Teh ini dapat diseduh berulang kali, menghasilkan rasa yang berbeda setiap seduhannya. (widyastik/dya)



**White Tea**



**The Oolong**



**The Rooibos**



**The Rosella**





# Inovasi Mahasiswa ITS, Deteksi TBC dari Suara Batuk



dan pengelolaan data medis dapat dilakukan secara efisien, terstruktur, dan berkelanjutan. Integrasi ini diharapkan dapat mendukung sistem layanan kesehatan digital, terutama di wilayah dengan keterbatasan fasilitas medis.

“Perangkat ini memiliki kemampuan pre-screening TBC yang bersifat portabel dan mudah dioperasikan oleh kader kesehatan di berbagai daerah,” tutur Nathania. Menurutnya, alat ini dirancang untuk membantu deteksi awal TBC secara cepat sebelum pasien menjalani pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan. Inovasi ini telah melalui uji validasi medis dengan hasil tingkat sensitivitas klasifikasi batuk tuberkulosis mencapai 76 persen. Sistem yang dikembangkan juga memanfaatkan data primer yang diperoleh dari 17 pasien di Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) sebagai dasar pengujian awal.

Saat ini, TBCare telah mencapai tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) skala 6, yang berarti prototipe sistem masih berada pada tahap pengujian di lingkungan yang relevan. Sistem ini direncanakan akan siap diuji secara lebih luas di lingkungan operasional apabila telah mencapai TKT skala 7.

Sebagai informasi, inovasi TBCare berhasil mengantarkan tim meraih medali emas pada kategori Karsa Cipta dalam Pekan Ilmiah Nasional Mahasiswa (Pimnas) ke-38 yang digelar pada November 2025. Nathania pun berharap inovasi yang dikembangkan dapat berkontribusi nyata dalam mendukung target eliminasi penyakit TBC di Indonesia pada tahun 2030. (ama,rls/dya)

**T**IM mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya membuat inovasi deteksi dini penyakit Tuberkulosis (TBC) menggunakan sistem tapis berbasis suara batuk. Sistem ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengatasi keterbatasan akses terhadap alatscreening.

Tim ini terdiri dari lima mahasiswa berbagai jurusan di ITS, yakni Nathania Cahya Romadhona, Nikolas Stanislaus Sanjaya, Faisal Azmi Sirajudin, Miskiyah, dan M Rizki Dwi Kurnia Putra. Mereka menamakan inovasinya itu TBCare.

Ketua tim, Nathania, mengatakan bahwa ide ini berawal dari tingginya angka penderita TBC di Indonesia. Karenanya, mereka ingin masyarakat

semakin menjangkau sistem screening TBC dengan mudah.

“Salah satu gejala utama TBC adalah batuk kronis yang berlangsung lebih dari dua sampai tiga minggu. Karenanya, metode screening berbasis suara batuk menjadi pendekatan medis inovatif yang lebih hemat biaya dan mudah dijangkau oleh masyarakat,” kata Nathania lewat keterangannya.

Nathania mTidak berhenti di situ, tim peneliti juga melakukan sejumlah modifikasi pada arsitektur deep learning yang digunakan. Modifikasi ini dilakukan melalui proses ekstraksi fitur akustik menggunakan Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC), yang kemudian diproses sebagai input pada model Long Short-Term Memory (LSTM). Pendekatan ini

dipilih karena LSTM dinilai efektif dalam menganalisis data berbasis urutan waktu seperti suara. Modifikasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan tingkat akurasi sistem dalam membedakan batuk TBC dan batuk non-TBC secara lebih optimal.

Berdasarkan model yang telah dikembangkan, tim yang dibimbing oleh Dhany Arifianto ini juga merancang perangkat perekaman suara batuk yang terintegrasi dengan sistem Internet of Things (IoT). Perangkat ini dirancang agar dapat terhubung langsung dengan basis data rumah sakit, sehingga proses pengiriman, penyimpanan,



HARIAN  
**LETERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LETERA TODAY”  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**MEDIA TERVERIFIKASI**

**BIRO: SURABAYA:** YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH  
**DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



# Ide Outfit Sesuai Prediksi Tren Warna 2026

Tren warna 2026 sudah mulai terlihat di runway, street style, sampai OOTD (Outfit of the Day/Pakaian Hari Ini) yang viral di Instagram hingga TikTok. Inipun jadi momen tepat buat update style, agar tetap relevan dan standout. Dari warna teal mewah ala Alexandrite, putih bersih Cloud Dancer yang lagi ramai dibahas, sampai Peridot dan Amaranth yang super chic, semua warna ini diprediksi akan mendominasi warna OOTD di tahun ini.

**B**agi yang suka cari cara mix & match warna outfit, ide outfit, atau inspirasi warna untuk OOTD, artikel ini akan jadi panduan lengkap memilih palet warna 2026 yang modern, versatile, dan pastinya wearable. Yuk, eksplor warna-warna yang lagi naik daun dan temukan shade mana yang paling menggambarkan personal style dirimu.

## Alexandrite: Teal Mewah yang Auto Bikin OOTD Terlihat Mahal

Warna Alexandrite dengan nuansa teal yang dalam lagi naik daun dan jadi salah satu prediksi warna 2026 yang paling sering muncul di runway maupun street style. Kamu bisa memadukannya dengan earthy tones seperti cokelat, maroon, atau hijau gelap untuk menciptakan kesan elegan dan mahal tanpa usaha berlebihan.

Kalau mau tampilan yang lebih bold, tambahkan tas atau aksesoris



berwarna kontras seperti kuning atau mustard supaya teal-nya makin pop dan terlihat modern. Atau kalau kamu ingin gaya winter yang cozy, coba layering scarf teal besar dengan knitwear warna creamy, hasilnya soft, hangat, dan tetap chic. Alexandrite juga cocok buat office look, smart casual, bahkan style musim hujan yang ingin terlihat classy, tapi tetap santai.

## Cloud Dancer: White Clean Girl Look yang Nggak Boring Sama Sekali

Cloud Dancer jadi pilihan Pantone untuk Color of the Year 2026 yang sempat buat heboh karena banyak yang menganggap warna putih bersih ini "terlalu aman" atau bahkan boring. Namun tenang, Beauties! Warna ini justru bisa jadi senjata rahasia buat OOTD yang clean, modern, dan super versatile.

Kamu bisa mainkan siluet dan tekstur, misalnya kemeja putih oversize dipadukan dengan rok lace untuk look yang polished tapi tetap sensual. Atau kalau mau kesan artsy, coba knitwear putih dengan tekstur unik dan kombinasikan dengan motif playful seperti gingham. Cloud Dancer juga mudah dijadikan kanvas buat statement piece, cukup tambahkan sepatu merah, tas bold, atau aksesoris warna cerah.

## Peridot: Sage Green Lembut yang Selalu Bikin OOTD Terlihat Calm & Chic

Peridot si sage green lembut nggak pernah gagal buat outfit terasa harmonis dan calming. Kamu bisa menciptakan palet earthy yang cozy dengan memadukan sage green dengan plum, olive, atau beige untuk aura "fashion editor" yang santai tapi mahal.

Kalau mau tampil lebih fresh, coba padukan blazer Peridot dengan knit kuning lembut, kombinasi yang unexpected tapi justru terlihat modern dan cocok untuk vibes warna 2026 yang playful. Warna ini ideal buat daily outfit yang ingin terlihat lebih chic tanpa harus pakai warna mencolok, dan juga aman untuk office look atau smart casual yang butuh sedikit sentuhan warna.

## Amaranth: Plum Drama Girl Shade untuk OOTD Bold nan Elegan

Amaranth, si ungu plum deep yang dramatis, adalah warna yang tepat kalau kamu mau

tampil standout tanpa harus pakai warna neon atau super terang. Kamu bisa eksplor look artsy dan edgy dengan memadukan Amaranth dengan hitam fitted top dan outer berwarna olive untuk kesan sophisticated.

Kalau ingin gaya yang lebih minimalis tapi tetap impactful, coba wide-leg Amaranth dengan sleeveless knit abu-abu, simple tapi kelihatan high-fashion ala street style Jepang. Warna ini cocok dipakai saat hangout malam, event kreatif, atau hari-hari ketika kamu mau terlihat bold, confident, dan elegan.

Capri Blue: Bright Blue Fun yang Bikin OOTD Kamu Makin Playful

Capri Blue adalah warna yang cerah, fun, dan langsung buat mood naik. Kamu bisa pilih knit biru terang dan padukan dengan bottom hitam untuk gaya yang effortless tapi tetap eye-catching. Kalau kamu suka look yang playful, coba kombinasikan dengan warna-warna statement seperti kuning, coklat, atau motif polkadot yang lagi balik tren. Hasilnya cheerful, youthful, dan sangat "2026 coded".

## Firefly: Lime Neon Futuristik Buat OOTD 2026 Auto Standout

Firefly diprediksi jadi salah satu warna paling viral di 2026. Lime green cerah ini langsung memberi kesan enerjik, futuristik, dan super-bold. Meski terlihat intens, Firefly mudah untuk dimainkan

terutama kalau kamu suka eksplor siluet dan tekstur.

Buat gaya yang playful, kamu bisa pilih knit atau cardigan Firefly lalu padukan dengan rok shimmer, leather jacket, atau sepatu dengan warna tren seperti strawberry pink atau berry red, kombinasi yang artsy tapi tetap wearable untuk jalan-jalan atau brunch.

Kalau kamu mau tampilan yang lebih edgy, coba gunakan Firefly sebagai statement piece lewat draped skirt atau celana cutting unik. Cukup tambahkan atasan hitam dan lace stocking, dan look kamu langsung terkesan whimsical, tanpa usaha berlebihan. Dengan sedikit eksplorasi, warna ini bisa jadi signature color untuk OOTD kamu di 2026, fresh, berani, dan penuh personality. (wid, bea, ist/dya)





## Konstruksi Korupsi...dari hal 1

**N**ama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), ikut tercantum dalam konstruksi perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024 yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, keterlibatan Jokowi disebut sebatas pada konteks awal peristiwa, yakni pertemuan kenegaraan dengan Pemerintah Arab Saudi yang berujung pada penambahan kuota haji untuk Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat memaparkan secara rinci konstruksi perkara dan peran para tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.

Asep menjelaskan, perkara ini bermula pada akhir 2023, ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan resmi ke Arab Saudi dan bertemu dengan pimpinan Kerajaan Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, salah satu isu yang dibahas adalah panjangnya antrean haji reguler di Indonesia yang telah mencapai puluhan tahun.

“Jadi rekan-rekan, di tahun 2023 akhir ya—ini saya kembali lagi ulas—bahwa Presiden Republik Indonesia pada saat itu ada kunjungan ke Saudi Arabia. Dan ketemu waktu itu adalah MBS ya, Mohammed bin Salman,” ujar Asep kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026).

Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah Arab Saudi kemudian memberikan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah kepada Indonesia. Kuota tersebut menambah jatah haji Indonesia yang sebelumnya berada di angka sekitar 221 ribu jemaah.

“Kemudian cerita terkait dengan bahwa antrean haji, maksudnya antrean haji yang reguler, itu sudah mencapai puluhan tahun. Maka kemudian diberikanlah tambahan kuota. Yang biasanya 221.000, kemudian ditambah lah 20.000 kuota ini,” lanjut Asep.

Namun, Asep menegaskan bahwa tambahan kuota tersebut diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Negara Republik Indonesia, bukan kepada individu maupun kepada Menteri Agama secara pribadi.

“Nah, kuota ini diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu kepada negara. Catat ya, rekan-rekan. Bahwa kuota itu, yang 20.000 itu, diberikan oleh Pemerintah Saudi Arabia kepada Negara Republik Indonesia. Bukan diberikan kepada perorangan, bukan diberikan kepada Menteri Agama,” tegasnya.

Masalah muncul dalam tahap pelaksanaan di dalam negeri. Menurut KPK, Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama saat itu memutuskan untuk membagi kuota tambahan tersebut dengan proporsi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus, masing-masing sebanyak 10 ribu kuota.

Padahal, pembagian kuota haji telah diatur secara jelas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengamankan proporsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

“Menteri Agama pada saat itu, Saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen - 50 persen. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya,” ujar Asep.

Dalam proses pembagian kuota tersebut, KPK juga menemukan peran aktif Gus Alex selaku staf khusus Menteri Agama yang turut serta dalam pengaturan distribusi kuota tambahan tersebut.

“Dari 10.000 - 10.000 itu kemudian, Saudara IAA ini adalah staf khususnya, ikut serta di dalam proses pembagian,” kata Asep.

Kuota haji khusus tersebut kemudian dialokasikan kepada sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji

Khusus (PIHK) atau biro perjalanan haji. Salah satu penerima kuota tersebut adalah pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur. Dalam prosesnya, KPK menduga adanya praktik kickback atau aliran dana balik dari biro travel kepada oknum di Kementerian Agama.

“Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan menemukan adanya aliran uang kembali, kickback dan lain-lain. Jadi seperti itu peran yang secara umum kami temukan,” ungkap Asep.

Dana tersebut diduga berasal dari penjualan kuota haji khusus kepada calon jemaah. KPK memperkirakan potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp1 triliun, meski hingga kini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan penghitungan secara resmi.

KPK secara resmi menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex sebagai tersangka pada Kamis, 8 Januari 2026. Penetapan tersangka tersebut diumumkan ke publik pada Jumat (9/1/2026). Meski demikian, hingga saat ini keduanya belum dilakukan penahanan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penahanan terhadap para tersangka pasti akan dilakukan, namun belum dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Tentunya bakal ditahan, tapi bukan hari ini ya,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa penetapan tersangka telah didasarkan pada kecukupan alat bukti yang dikumpulkan penyidik, mulai dari pemeriksaan saksi, dokumen, bukti elektronik, hingga hasil penggeledahan di sejumlah lokasi.

“Penetapan seorang tersangka tentunya berdasarkan adanya kecukupan alat bukti. Alat bukti sudah tebal dan semua pimpinan KPK sepakat bulat,” tegas Budi.

Terkait kemungkinan pemanggilan Presiden Jokowi sebagai saksi dalam perkara ini, KPK menyatakan terbuka untuk memanggil siapa pun yang dinilai mengetahui atau dapat membantu mengungkap konstruksi perkara secara terangbenderang.

“Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” kata Budi.

Namun, ketika ditanya mengenai kemungkinan pemanggilan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul-Aziz Al Saud, KPK memilih tidak memberikan tanggapan lebih lanjut. (gus,ist tmo,blo/dya)

## Menyoal Status Bos Maktour dan Ratusan Biro Travel

**KOMISI** Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memperjelas status hukum pemilik biro perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, dalam perkara dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024. Desakan ini mengemuka seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru yang mengatur bahwa pencekalan ke luar negeri hanya dapat dikenakan kepada pihak yang telah berstatus tersangka.

Ahli Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, menilai langkah KPK yang memperpanjang pencekalan terhadap Fuad perlu disertai kejelasan status hukum yang bersangkutan. Menurutnya, jika KPK tetap memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri, maka secara hukum Fuad seharusnya ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau menurut ketentuan KUHP baru, pencekalan hanya bisa diterapkan terhadap tersangka. Sehingga semestinya ada penentuan status yang bersangkutan, apakah ditetapkan tersangka dan tetap dicekal,” ujar Chairul Huda.

Huda menjelaskan, secara konstruksi hukum, perkara dugaan korupsi kuota haji berpangkal pada kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas. Karena itu, pertanggungjawaban pidana utama berada pada pengambil keputusan di level kementerian, bukan langsung pada pihak swasta.

“Ini berpangkal dari keputusan menteri. Maka pertanggungjawaban terutama dibebankan kepada menteri yang bersangkutan dan atasannya, tidak serta merta kepada pihak swasta seperti pimpinan Maktour,” katanya.

Meski demikian, Huda menegaskan bahwa keterlibatan pihak swasta tetap bisa dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti ada persekongkolan, aliran dana, atau keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.

Sementara itu, penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dinilai Huda sudah tepat. Ia menilai keputusan Yaqut membagi kuota tambahan haji tahun 2024 secara merata, masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen

untuk haji khusus, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

“Saya kira tepat ya, karena ini berkaitan dengan keputusan Menag yang membagi kuota tambahan 50 persen reguler dan 50 persen haji khusus. Padahal undang-undang sudah mengatur proporsinya. Ini jelas bertentangan dengan UU dan dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum,” jelasnya.

Dalam pengembangan perkara, KPK tidak hanya menasar internal Kementerian Agama. Lembaga antirasuah juga memperluas penyelidikan ke ratusan biro perjalanan haji dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, langkah tersebut penting untuk mengungkap secara utuh mekanisme penyelenggaraan ibadah haji dan dugaan praktik jual beli kuota.

“Penyidikan perkara ini memang tidak hanya memeriksa pihak Kementerian Agama, tetapi juga institusi lain yang mengetahui proses dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/1/2026). (wid,blo,ist/dya)

# KODE PEMERINTAH: AWAL RAMADAN 2026 BERPOTENSI BERBEDA

Penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah atau puasa tahun 2026 berpotensi kembali mengalami perbedaan di Indonesia. Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan, meski kalender Hijriah pemerintah dan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam telah memuat prediksi awal Ramadan, pemerintah tetap menunggu hasil sidang isbat sebagai penentu resmi dimulainya ibadah puasa.

## AWAL RAMADAN 2026

- MUHAMMADIYAH**  
Menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini berdasarkan Maklumat resmi dan perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
- PEMERINTAH (KEMENTERIAN AGAMA)**  
Pemerintah belum menetapkan resmi tanggal awal Ramadan 1447 H sampai sidang isbat digelar. Pemerintah biasanya menentukan setelah mempertimbangkan hasil rukyatul hilal dan hisab. Kalender proyeksi pemerintah menunjukkan peluang awal Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026 berdasarkan perhitungan umum, namun keputusan akhir menunggu sidang isbat.
- NAHDLATUL ULAMA (NU)**  
PBNU belum mengumumkan secara resmi tanggal 1 Ramadan 1447 H sebelum sidang isbat dan hasil pemantauan hilal. NU umumnya akan mengikuti hasil rukyatul hilal di berbagai lokasi sebagai dasar pengumuman akhir.



Petugas Kementerian Agama memantau Rukyatul Hilal atau posisi bulan baru untuk menentukan awal Ramadhan di Jakarta.dok

**K**epala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menjelaskan bahwa berdasarkan kalender Hijriah pemerintah, awal Ramadan 1447 H diproyeksikan jatuh pada 19 Februari 2026. Namun, penetapan tersebut belum bersifat final karena masih menunggu sidang isbat yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Februari 2026.

“Dalam kalender Hijriah pemerintah dan beberapa ormas, awal Ramadan tercantum pada 19 Februari 2026. Namun, untuk pemerintah tetap menunggu pelaksanaan sidang isbat awal Ramadan 1447 H, yang insyaallah akan dilaksanakan pada 17 Februari

2026,” ujar Thobib kepada wartawan, Minggu (11/1/2026).

Di sisi lain, Thobib mengungkapkan bahwa Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah. Penetapan tersebut tertuang dalam maklumat resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyebutkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

“Maklumat Ormas Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan 1447 H bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2026,” katanya.

Dengan adanya perbedaan tersebut, Kemenag menilai potensi perbedaan awal puasa di tengah

masyarakat sangat mungkin terjadi. Meski demikian, Thobib menegaskan bahwa kondisi semacam ini bukanlah hal baru dalam praktik penetapan kalender Hijriah di Indonesia.

“Di Indonesia hal ini sudah biasa terjadi. Namun, kami tetap mengimbau agar publik dapat mengikuti keputusan pemerintah,” jelasnya.

Meski mengimbau masyarakat mengikuti keputusan pemerintah, Kemenag menegaskan tidak menutup ruang bagi umat Islam yang memilih mengikuti penetapan awal Ramadan berdasarkan keyakinan dan metode masing-masing. Namun, masyarakat diminta tetap menjaga persatuan dan kerukunan bangsa.

“Jika memang hal ini tidak bisa dihindarkan, di tengah perbedaan, kami berharap masyarakat tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah,” ucap Thobib.

Perbedaan penetapan awal Ramadan juga menjadi sorotan seiring terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 2 dan 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026. SKB tersebut menetapkan libur nasional Idul Fitri 1447 Hijriah pada 20–21 Maret 2026. Penetapan itu secara tidak langsung memberi gambaran rentang waktu pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 2026.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa SKB tersebut bersifat administratif dan tidak menggantikan ketentuan syariat terkait penetapan awal Ramadan yang tetap ditentukan melalui sidang isbat.

Peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, turut menjelaskan secara astronomis potensi perbedaan awal Ramadan 2026. Ia menyebut perbedaan kriteria visibilitas hilal menjadi faktor utama yang memunculkan perbedaan penetapan.

“Fakta astronomi pada saat maghrib 17 Februari 2026 di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi kriteria MABIMS yang digunakan pemerintah, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat,” kata Thomas dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya.

Menurutnya, karena kriteria tersebut belum terpenuhi di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, maka awal Ramadan versi pemerintah berpotensi jatuh pada 19 Februari 2026.(gus,ist,kum/dya)

## Jelang Lebaran, Pemerintah Waspada Inflasi Pangan

Ramadan dan Lebaran.

“Kalau harga minyak goreng, ayam, dan telur naik menghadapi Ramadan dan Lebaran, aku cari produsen itu dan insyaallah aku cabut izinnya,” kata Amran dilihat Minggu, (9/1/2026).

Amran menegaskan, kewenangan perizinan berada di bawah kendalinya. Oleh karena itu, ia meminta para produsen tidak mencoba mencari keuntungan berlebih dengan memanfaatkan meningkatnya permintaan masyarakat pada periode hari besar keagamaan.

“Saya sudah beritahu, aku cabut izin itu. Kalau izin, kewenangan saya,” ujarnya menegaskan.

Ancaman tersebut, menurut Amran, bukan sekadar pernyataan simbolik. Ia menyebut telah mendapatkan dukungan penegakan dari berbagai pihak, termasuk TNI dan Kepolisian, guna memastikan stabilitas harga pangan nasional tetap terjaga.

Langkah tegas pemerintah ini muncul di tengah dinamika harga pangan yang mulai menunjukkan tren kenaikan pada sejumlah komoditas. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan dalam satu bulan terakhir, harga telur ayam ras secara nasional tercatat naik 1,51 persen, dari Rp33.200 menjadi Rp33.700 per kilogram.(wid,ist,kum/dya)

**PEMERINTAH** menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran 2026. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat pada momentum hari besar keagamaan, pemerintah tidak hanya mengandalkan langkah pengendalian inflasi, tetapi juga mengeluarkan peringatan keras kepada para produsen pangan agar tidak memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara sepihak.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, secara tegas mengancam akan mencabut izin usaha produsen pangan yang terbukti menaikkan harga komoditas strategis seperti minyak goreng, ayam, dan telur menjelang